



# E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://epaper.dpr.go.id>

**Judul** : Sri Mulyani: Dulu Ancaman Masyarakat itu Pandemi, Sekarang Kenaikan Harga Pangan  
**Tanggal** : Selasa, 05 April 2022  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : -

**Merdeka.com** - Menteri Keuangan, [Sri Mulyani Indrawati](#) akan menyiapkan dana APBN untuk segera disalurkan ke berbagai program subsidi yang dibuat pemerintah. Hal ini dilakukan dalam rangka memitigasi kenaikan harga komoditas global yang membuat harga-harga ditingkat konsumen melonjak.

"Dari Kementerian Keuangan akan menyiapkan dari sisi APBN-nya," kata [Sri Mulyani](#) usai sidang Kabinet Paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia di Istana Negara, [Jakarta](#), Selasa (5/4).

Dia menjelaskan, kenaikan berbagai harga komoditas sebenarnya menguntungkan kas negara. Sebab penerimaan negara akan naik baik dari minyak, gas, batu bara, nikel, hingga CPO.

"Itu memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara," katanya.

Namun di sisi lain masyarakat merasakan rambatan dari inflasi global tersebut. Sehingga menurutnya pemerintah memang perlu mengambil langkah mitigasi, sebelum menjadi ancaman bagi masyarakat.

"Dulu tantangan dan ancaman masyarakat adalah pandemi. Sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan barang-barang tersebut," kata dia.

### Rumuskan Langkah Baru

Dari sisi APBN pihaknya akan merumuskan langkah-langkah tambahan penerimaan agar bisa dialokasikan secara tepat. Sehingga bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi tapi juga menjaga APBN.

"Ini 3 hal penting yang harus dilakukan," kata dia mengakhiri.

Sebagai informasi, pemerintah dalam waktu dekat akan menyalurkan BLT Minyak goreng kepada 23,5 juta penerima. Dalam program ini pemerintah membutuhkan dana Rp6,9 triliun.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Sebanyak Rp8,8 triliun dana harus disiapkan untuk 8,8 juta penerima.

Belum lagi program bansos produktif untuk pelaku usaha mikro. Akan ada 12 juta penerima yang masing-masing mendapatkan bantuan dana Rp600.000. Sehingga kebutuhannya Rp7,2 triliun. **[idr]**